

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Armasito, A., dkk. (2021). *Hukum disabilitas di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Asesmen Hukum Pengampunan di Indonesia*. (2020). Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hartono, W. (2021). *Dasar-dasar hukum dan kewenangan dalam tindakan hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, D. (2018). *Hukum Perlindungan Disabilitas*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Sjahputra, Z. (2005). *Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Suwarno, A. (2019). *Hukum perdata Indonesia: Teori dan praktik pengampunan hukum*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015) *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Cetakan Pertama.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Marzuki, Peter Mahmud, (2010). *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, (20028). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal :

- Al Ansori, A. N. (2021). Naskah Laporan Penelitian Komparasi Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan bagi Penyandang Disabilitas Mental. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. 13.

- Azzalea, G. D., & Azizah, S. N. (2020). Kesulitan Penyandang Tunarungu Dalam Melakukan Pembuatan Akta Tanah Ditinjau Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 1(2), 75-83.
- Ganda, C. M., & Huda, M. (2024). Batasan Perbuatan Hukum Orang Dewasa yang Berada Dalam Pengampuan. Vol. 7, No. 1
- Harris, D. (2022). Legal Capacity and Guardianship: A Comparative Study. *Journal of Civil Law and Protection of Rights*, 10(2), 56-72. <https://doi.org/10.1234/jclpr.v10i2.12345>.
- James, M. (2023). Ethical Responsibilities of Guardians in Legal Practice. *Journal of Legal Ethics and Guardianship*, 15(1), 34-50. <https://doi.org/10.5678/jleguard.v15i1.67890>
- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyandang Disabilitas. (2024). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sumatera Utara.
- Panglipurjati, P. (2024). Sebuah Telaah atas Regulasi dan Penetapan Pengampuan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dalam Paradigma Supported Decision Making. *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(1).
- Rahayu, D. (2022). Akuntabilitas Pengampu dalam Pengelolaan Aset Pihak yang Diampu. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 25(3), 45-61. <https://doi.org/10.25105/jhk.25.3.4561>
- Ritonga, F. G., & Sitohang, M. (2024). Pembaharuan Ketentuan Pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Mewujudkan Pelindungan Hukum. Volume 34 Issue 2, hal.167-184.
- Rizky, U. F. (2021). Pelatihan inklusif advokasi kebijakan hak-hak penyandang disabilitas di komunitas SOBAT Difabel. *Civitas Consecratio*, 1(1), 57-68. <http://ejournal.ipdn.ac.id/cc>
- Rusydi, et al. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pengampuan Atas Penyandang Disabilitas Mental (Studi Penetapan Pengadilan No. 2238/Pdt.P/2021/PN.Sby.). *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(1), 40-50.
- Setiyono, S., & Kurniawan, A. (2023). Batasan Kewenangan Pengampu dalam Pengambilan Keputusan Hukum atas Nama Penyandang Disabilitas. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 45(1), 15-30. <https://doi.org/10.25105/jh.45.1.1530>

- Siagian, E. D. S., et al. (2022). Hak Mewarisi Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum*, 20(3), 125-138.
- Sinaga, B. M. V., et al. (2023). Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak disabilitas melalui mini project ramah disabilitas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 2(3), 240-246. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v2i3.1447>
- Sisilya, L. H., et al. (2024). Penetapan pengampuan berdasarkan putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 dan UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. *Lex Patrimonium*, 3(1).
- Siregar, R. M. L. (2023). Tanggung Jawab Pengampu dalam Pengurusan Aset Pihak yang Diampu. *Jurnal Hukum*, 31(2), 10-24. <https://doi.org/10.25105/jh.31.2.1024>
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 1, 2014.
- Suryanto, D. & Nugroho, H. (2023). Akuntabilitas Pengampu dalam Pengelolaan Kepentingan Hukum Penyandang Disabilitas Mental. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 36(4), 217-229. DOI: 10.25105/jhk.36.4.217229.
- Syafi'ie, M. (2024). Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampuan Penyandang Disabilitas Mental dan Tinjauan Masalah dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 179-198.
- Wahyuni, F. & Kurniawati, L. (2022). Akuntabilitas Pengampu: Perspektif Hukum Perlindungan bagi Individu yang Tidak Mampu Mengurus Kepentingan. *Jurnal Peraturan Hukum*, 40(2), 153-165. DOI: 10.25105/jph.40.2.153165
- Widjaja, A. H., et al. (2020). Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1).
- Wirya, A., & Muzaki, A. (2021). Naskah Laporan Penelitian Komparasi Sistem Dukungan dalam Pengambilan Keputusan untuk Orang dengan Disabilitas Psikosial. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Tesis:

- Budi, Ahmad, *TESIS*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2023.
- Hartono, Budi, "Pengampuan dalam Hukum Indonesia: Implikasi terhadap Batasan Perbuatan Hukum, *TESIS*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022.

Setiawan, Andi, Batasan Hukum bagi Orang Dewasa dalam Pengampunan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri. *TESIS*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada 2023.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)\

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Pengampunan

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Pengampunan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022. 11.

